BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pertimbangan pada pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa:

1. Tanda tangan elektronik berkedudukan hukum secara sah serta diakui di sistem hukum Indonesia, ditentukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan regulasi ini, bisa dipahami bahwasanya penerapan tanda tangan elektronik dapat diterapkan sejalan terhadap tanda tangan konvensional asalkan penerapannya mengikuti syarat yang ada menyesuaikan undang-undang yang diberlakukan. Dengan demikian tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi akan mempunyai kekuatan hukum serta pembuktian secara sah dimata hukum sebagaimana yang terjadi pada tanda tangan konvensional apabila dipergunakan pada dokumen elektronik.
2. Tanda tangan elektronik memiliki peranan yang penting dikarenakan hal ini dipergunakan sebagai bentuk pembaharuan sistem kenotariatan yang memanfaatkan teknologi. Walaupun sampai sekarang belum terdapat pengaturan yang dikhususkan namun dapat diinterpretasikan secara sistematis dari harmonisasi regulasi antara Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.2 tentang Jabatan Notaris. Apabila ini diterapkan maka dapat dipergunakan sebagai upaya strategis dalam mengikuti modernisasi sistem hukum di Indonesia. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, namun memerlukan kerangka peraturan hukum yang jelas diikuti dengan peningkatan pemahaman terhadap sistem hukum yang berbasis digital guna meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam melakukan suatu pelayanan hukum.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran berupa:

1. Diperlukan sebuah regulasi ataupun ketentuan jelas terkait *cyber notary* yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia melalui revisi atau pembaruan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar dapat mengakomodasi tanda tangan elektronik melalui sosialisasi dan pelatihan secara khusus kepada notaris terkait penerapan tanda tangan elektronik pada akta yang notaris buat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap dokumen yang dibuat nantinya agar dapat diterapkan sebagaimana ketentuan hukum yang diberlakukan di Indonesia dan sah dimata hukum.

2. Kerangka hukum yang jelas sangat diperlukan dalam penerapan tanda tangan elektronik agar pelayanan yang akan dilakukan notaris nantinya dapat terlaksana dengan terpercaya bagi seluruh pihak dan efisien untuk dilakukan. Tentunya hal ini memerlukan peran dari berbagai pihak baik itu antara notaris, pemerintah, sampai dengan penyelenggara sertifikasi elektronik diharapkan nantinya pelaksanaan terkait *cyber notary* yang mempergunakan tanda tangan elektronik sebagai pengesahan dokumen dan dibuat notaris dapat berkembang sesuai dengan proses digital serta tetap dapat menjaga keamanan dari berbagai pihak sebagai bentuk pelaksanaan transformasi digital dalam bidang hukum khususnya bidang kenotariatan dalam melakukan perannya sebagai pelayanan publik.